

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

Dalam bab paparan data penelitian ini diuraikan tentang (a) deskripsi lokasi penelitian mencakup gambaran umum Kota Banjarmasin dan Kementerian Agama Kota Banjarmasin serta (b) paparan data penelitian.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin terletak di daerah khatulistiwa $3^{\circ}15' - 3^{\circ}22'$ LS dan $114^{\circ}98' - 114^{\circ}98'$ BT, merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah ini terletak dengan ketinggian tanah rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut (DPL). Topografi berawa-rawa, dominan tanah alufial, struktur lempeng, batuan metamorf. Iklim tropis, suhu rata-rata 25°C s/d 38°C . Kota Banjarmasin terbelah oleh sungai Martapura yang bermuara di sungai Barito dan dialiri oleh anak-anak sungai sehingga Banjarmasin dikenal dengan Kota Seribu Sungai (*The Thousand Rivers City*).

Luas wilayah Kota Banjarmasin $\pm 72 \text{ km}^2$ terbagi dalam 5 (lima) wilayah administratif kecamatan dan 50 kelurahan, yaitu: (a) Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luas $20,18 \text{ km}^2$ dan 11 kelurahan; (b) Kecamatan Banjarmasin Utara dengan luas $15,25 \text{ km}^2$ dan 9 kelurahan; (c) Kecamatan Banjarmasin Timur dengan luas $11,54 \text{ km}^2$ dan 9 kelurahan; (d) Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan luas $11,54$

km² dan 12 kelurahan; dan (e) Kecamatan Banjarmasin Barat dengan luas 11,54 km² dan 9 kelurahan.¹

Kota Banjarmasin berbatasan dengan dua kabupaten tetangga, yaitu: (a) Sebelah utara dan sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala; dan (b) Sebelah timur dan sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar.

Luas Kota Banjarmasin 72.00 km² atau 0,19% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 50 buah kelurahan. Tahun 2010 Kota Banjarmasin berpenduduk 625.395 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan 1,10% per tahun.² Sebelum dibagi ke dalam lima kecamatan, Kota Banjarmasin hanya terdiri dari empat kecamatan, tidak termasuk Kecamatan Banjarmasin Tengah. Nama-nama kecamatan tersebut sebelumnya adalah Kecamatan Banjar barat, Banjar timur dan seterusnya, kemudian pada tahun 2005 dirubah menjadi Kecamatan Banjarmasin barat, Banjarmasin timur dan seterusnya.

Perincian jumlah penduduk di lima kecamatan dalam hal ini Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur dikemukakan dalam dalam tabel berikut:

¹Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, *Banjarmasin dalam Angka*, (Banjarmasin: Setda Kota Banjarmasin, 2009), h. 5.

²*Ibid.*, h. 6.

Tabel 1

JUMLAH PENDUDUK KOTA BANJARMASIN

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2000	Jumlah Penduduk 2010	Kepadatan 2000	Kepadatan 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Banjarmasin Selatan	118.835	145.958	5.889	7.233
Banjarmasin Timur	101.477	111.902	8.794	9.697
Banjarmasin Barat	131.372	143.402	9.826	10.726
Banjarmasin Tengah	96.348	91.780	8.263	7.871
Banjarmasin Utara	79.383	132.353	5.205	8.679
Banjarmasin	527.415	625.395	7.325	8.686

Sumber data: BPS Kota Banjarmasin, 2011.

Penduduk Banjarmasin terdiri dari berbagai suku dan ras, terbanyak adalah suku Banjar, sedangkan suku-suku lainnya adalah Jawa, Madura, Sunda, Dayak, Bugis, Arab, Minang, Batak, Cina dan sebagainya. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan dikenal dengan masyarakat religius. Hal ini ditandai dengan berbagai aktivitas keagamaan yang selalu mewarnai kehidupan masyarakatnya. Di samping itu terdapat banyak Masjid, Surau/langgar dan tempat-tempat ibadah agama lainnya.³

Di Kota Banjarmasin pada tahun 2010 terdapat 528 buah sekolah, baik sekolah umum maupun madrasah. Jumlah murid 13.058 orang, dengan jumlah guru

³Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin, *Peta Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: Pemerintah Kota Banjarmasin, 2007), h. 10.

sebanyak 786 orang. Adapun perincian lembaga pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2

**JUMLAH SEKOLAH DALAM NAUANGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No .	Jenis sekolah	Jumlah
1	SDN	249
2	SD swasta	30
3	SMPN	34
4	SMP Swasta	25
5	SMAN	13
6	SMA Swasta	16
7	SMKN	5
8	SMK Swasta	10
	Jumlah	382

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin 2010.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sekolah Dasar Negeri sebanyak 249 buah, dan swasta sebanyak 30 buah, SLTP Negeri 34 buah, dan swasta 25 buah, SMU Negeri 13 buah, swasta 16 buah, SMK Negeri sebanyak 5 buah, dan swasta 9 buah. Dapat ditambahkan, perguruan tinggi negeri yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan satu buah yaitu Universitas Lambung Mangkurat, sedangkan perguruan tinggi swasta cukup banyak, di antaranya Uniska Muhammad Arsyad al-Banjary, Sekolah Tinggi Kesehatan Muhammadiyah, STIH Sultan Adam, STKIP PGRI, STIEI Banjarmasin, STIE Pancasetia, STIE Nasional, STIMI, STIMIK, Uvaya dan masih banyak lagi.

Adapun sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel 3

**SEKOLAH/MADRASAH DALAM LINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGAMA**

No .	Jenis sekolah	Jumlah
1	MIN	5
2	MI Swasta	50
3	MTsN	3
4	MTs Swasta	25
5	MAN	3
6	MA Swasta	5
7	Jumlah	91

Sumber data: Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011.

Tabel di atas menjelaskan bahwa sekolah agama/madrasah yang ada di Kota Banjarmasin terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri 5 buah dan swasta 50 buah. Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri berjumlah 3 buah dan swasta 25 buah. Madrasah Aliyah (MA) negeri 3 buah dan swasta 5 buah. Sekolah-sekolah tersebut memiliki siswa, yaitu MI negeri 954 orang, MI swasta 782 orang, MTs negeri 2.459 orang, MTs swasta 3.111 orang, MA negeri 1.415 orang, dan MA swasta 499 orang. Siswanya berasal dari Banjarmasin dan sekitarnya. Perguruan tinggi agama negeri

adalah IAIN Antasari Banjarmasin dan perguruan tinggi agama swasta adalah STAI al-Jami Banjarmasin.⁴

2. Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Pada tanggal 3 Januari 1946 telah berdiri Departemen Agama RI dengan nama Kementerian Agama RI, waktu itu sebagai Menteri Agama yang pertama adalah Prof. Dr. H. Mohammad Rasyidi. Pada tahun 1947 di Banjarmasin berdiri Kantor Urusan Agama Kota Praja Banjarmasin. Tahun 1962 didirikan Kantor Pendidikan Agama Kota Praja Banjarmasin, Kemudian Kantor Penerangan Agama Kota Praja Banjarmasin serta Kantor Dinas Pendidikan Agama Kota Praja Banjarmasin

Sejalan dengan perkembangan zaman, Departemen Agama dalam menghadapi volume kerja yang semakin membesar, dimana jawatan-jawatan di daerah bukan saja dikoordinir, akan tetapi perlu dibimbing, dibina dan dikembangkan secara langsung, intensif dan terarah, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 tahun 1972 yang menyempurnakan struktur organisasi, tugas dan wewenang instansi Departemen Agama di daerah-daerah. Atas dasar keputusan tersebut, maka di Kalimantan Selatan yang selama ini hanya ada perwakilan Departemen Agama Provinsi, didirikanlah perwakilan Kabupaten/Kotamadya.

Selanjutnya tugas dan wewenang perwakilan yang sebelumnya hanya sebagai koordinator, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.36 tahun 1972, perwakilan Departemen Agama tidak saja sebagai koordinator tapi sebagai pembina

⁴Amal Fathullah (Editor), *Profil Kementerian Agama dan Kerukunan*, (Banjarmasin: Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan, 2009), h. 30.

dan pembimbing terhadap jawatan-jawatan agama itu dan berubah menjadi Inspeksi Policy dan kebijaksanaan baik teknis maupun administratif menjadi tanggung jawab pada perwakilan, sedangkan inspeksi hanya sebagai pelaksana teknis.⁵

Kemudian dengan adanya Keppres No.44 dan 45 tahun 1974 yang diikuti lagi keluarnya Keputusan Menteri Agama No.18 tahun1975, maka terjadi lagi perubahan nama perwakilan itu menjadi Kantor Wilayah untuk tingkat Provinsi, Kantor Departemen Agama untuk Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Urusan untuk Tingkat Kecamatan, sedangkan Inspeksi menjadi Bidang Pembimbing dan pada Kandepag Kabupaten/Kotamadya petugas teknis tersebut menjadi Seksi dan Penyelenggara Bimbingan.

Nama tersebut tetap berlaku hingga sekarang, perkembangan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 diadakan lagi perubahan dan penyempurnaan dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 antara lain memperjelas tentang tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di daerah. Selanjutnya terjadi lagi perubahan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1981 dengan keluarnya KMA Nomor 373 Tahun 2002 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 pasal 82, Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin mempunyai tugas, melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya

⁵*Ibid.*, h. 32.

berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 masuk dalam katagori Tipologi 1 A yang terdiri dari Sub bagian Tata Usaha, Seksi Urusan Agama Islam (Urais), Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapendais) pada sekolah Umum, Seksi Pendidikan Keagamaan dan pondok Pesantren (Peka Pontren), seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Penyelenggara zakat dan wakaf, serta kelompok jabatan fungsional.⁶ Nama-nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin sejak berdiri hingga sekarang adalah sebagai berikut⁷:

Tabel 4

**NAMA-NAMA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARMASIN**

No	Nama	Periode
1	H. Abul Majid Salman	1970-1973
2	Drs. H.Mas'ud Djuhri	1973-1984
3	H. Syukran AM, BA	1984-1986
4	Drs. H. Ismail Ahmad	1986 – 1991
5	Drs.H. Muhammad H. Husaini	1991 – 1997
6	Drs. H. M. Rusli	1997 – 2002
7	Drs. H. Abu Bakar Kabi	2002 – 2003
8	Drs. H. Darul Quthni	2003 – 2005
9	Drs. H. Gufran Ismail	2005 – 2009
10	DR..H. Ahmadi H Syukran, MM	2009 – Sekarang

⁶*Ibid.*, h. 34.

⁷Hasil penelitian diolah oleh peneliti.

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2012

Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan masyarakat Kota Banjarmasin yang mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara optimal. Sedangkan yang menjadi misinya adalah (1) Meningkatkan Kualitas SDM, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan di bidang ke Tata Usahaan; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan di bidang Urais; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan ibadah Haji dan Umrah; (4) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada Madrasah dan Sekolah Umum; (5) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama pada masyarakat; (6) Meningkatkan kualitas pembinaan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; dan (7) Meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan Zakat dan Wakaf.

Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin memiliki tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Adapun yang menjadi tugasnya adalah:

- a. Berdasarkan KMA Nomor 373 Tahun 2002 Pasal 82, Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Berdasarkan KMA Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama

Kabupaten/kota, maka Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin termasuk dalam tipologi 1-A.⁸

Selanjutnya selain tugas tersebut di atas Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 KMA Nomor 373 tahun 2002 mempunyai fungsi, yaitu:

- (1) Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten/Kota;
- (2) Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
- (4) Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
- (5) Pengkajian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- (6) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kabupaten/Kota.

⁸Amal Fathullah, *Op cit.*, h. 50.

Di samping mempunyai tugas dan fungsinya Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin juga memiliki program utamanya, yakni:

- a. Peningkatan pembinaan SDM, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan di bidang ke Tata Usahaan;
- b. Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang Urais;
- c. Peningkatan mutu pelayanan dan bimbingan ibadah haji dan umrah;
- d. Peningkatan pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan pada Madrasah dan Sekolah Umum;
- e. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama pada masyarakat;
- f. Peningkatan pembinaan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah;
- g. Peningkatan pembinaan pengelola Zakat dan Wakaf.

Susunan organisasi Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin sebagaimana tersebut dalam Pasal 86 ayat (2) KMA Nomor 373 tahun 2002 sebagai berikut:

- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi Urusan Agama Islam;
- (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- (4) Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (Mapenda);
- (5) Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren;
- (6) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid; dan

(7) Penyelenggara Zakat dan Wakaf;⁹

Pengawas Pendidikan Agama Islam berada dalam naungan Seksi Mapenda, yang tugasnya adalah:

- (a) melaksanakan tugas bidang Mapenda;
- (b) menetapkan sasaran, program dan rencana kerja bidang;
- (c) membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan dan membimbing tugas kepagawaian bidang;
- (d) menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan bidang Mapenda;
- (e) melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait;
- (f) menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul;
- (g) melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang kurikulum;
- (h) melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang ketanagaan dan kesiswaan;
- (i) melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang sarana dan prasarana;
- (j) melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- (k) melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang supervisi dan evaluasi pendidikan;
- (l) memantau dan mengevaluasi pekerjaan bidang;
- (m) melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala kanwil.

Jadi, di Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin ada Seksi Mapenda yang dikelalai oleh seorang Kepala Seksi. Dialah yang bertugas membina para

⁹ Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2012.

pengawas yang ada dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang berjumlah sebanyak 20 orang. Para pengawas ini disediakan dalam suatu ruangan khusus sebagai kantor untuk tempat berkumpul dan menjalankan koordinasi tugasnya. Namun sehari-hari ini mereka lebih banyak berada di lapangan untuk menjalankan tugas-tugas supervisi.

A. Paparan Data

1. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Banjarmasin

a. Keberadaan Pengawas

Secara keseluruhan, ada 20 orang pengawas dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Nama dan tempat / wilayah tugas mereka dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel 5

DAFTAR PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KOTA BANJARMASIN

No	Nama pengawas	Tempat Tugas
1	Drs. Herman Tarmizi	SMP/MTs/MA/SMA/SMK
2	Dra. Hj. Siti Rusdiyah	Sda
3	Drs. Ahmad Husaini	Sda
4	Dra. Noorhasanah	Sda
5	M. Aziddin Noor, SPd.I	Sda
6	Drs. Arifinsyah	Sda
7	Idram, SPd.	Sda
8	Drs. H. Bahruddin	Sda
9	Hj. Faridah, BA	TK/RA/SD/MI
10	H. Muhammad, SPd.I	Sda
11	Hj. Hafifah, SPd.I	Sda

12	HM Yusran, SPd.I	Sda
13	St. Latifah, SPd.I	Sda
14	Dra. Siti Murni	Sda
15	Dra. Hj. Rukayah	Sda
16	Drs. H. Rusidiansyah, MPd.	Sda
17	Ahmad Ruyani, SPd.I	Sda
18	Dra. Hj. Najmi Haderiani, MA	Sda
19	Salafuddin Fitri, SAg.MPd.	Sda
20	Heny Widyawati, SPd.	Sda
21	Hj. Zuhriah, SPd.MPd.	Sda

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2012,

Para pengawas sebagaimana dikemukakan di atas, mengawasi sejumlah guru PAI. Jumlah guru PAI yang mereka awasi, relatif banyak. Berikut ini dikemukakan nama-nama guru Pendidikan Agama Islam, khususnya di Sekolah Menengah atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Banjarmasin:

Tabel 6

DAFTAR GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMAN/SMKN
KOTA BANJARMASIN

No	Nama Guru	Tempat Tugas
1	Drs. Supriyatno, M.Pd.I.	SMAN 4
2	Drs. H. Ahmad Zurkani	SMAN 1
3	Gusti Surian, S.Ag.M.Pd..I.	SMAN 1
4	Dra. Mariani	SMAN 5
5	Drs. H. Hamdani, M.Pd.I.	SMAN 9
6	M. Yuserin BA	SMAN 3
7	Drs. H.M Gazali, MPd.I	SMAN 10
8	Khadijah, S.Ag.	SMAN 1
9	Drs. Sarbani	SMAN 2
10	Dra. Rusmiati	SMAN 5
11	Dra. Norbainah	SMAN 3

12	Dra. Maimunah	SMAN 5
13	Dra. Astiah	SMAN 2
14	Dra. Rahayu Rahmi	SMAN 4
15	Dra. Hj. Rukayah	SMAN 7
16	Dra. Hj. Salamah	SMAN 6
17	Dra. Hj. Mulkah	SMAN 8
18	Dra. Saidah	SMAN 10
19	Drs. Abidin Noor	SMAN 12
20	Drs. Syaifuddin Z	SMAN 12
21	Drs. Badaruddin.	SMAN 13
22	Drs. Hamberan	SMAN 13
23	Drs. M. Syafi'e	SMAN 8
24	Dra. Muhibbah	SMAN 2
25	Drs. Adiannor Hidayatullah, M.Pd.I.	SMKN 4
26	Sahrawi, S.Ag.	SMKN 5
27	Drs. Ahmad Rizqan, MPd.I.	SMKN 3
28	Drs. Khairil Anwar	SMKN 2
29	Drs. Abdul Hayat	SMKN 1

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, 2012.

Penelitian ini hanya difokuskan pada Pengawas SMA/SMK yang berjumlah 3 orang, yaitu sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel 7

PENGAWAS GURU PENDIDIKANA GAMA ISLAM SMAN
KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA PENGAWAS	SEKOLAH BINAAN
1	Drs. H. Herman Tarmidzi	SMAN 1, SMAN 5, SMAN 6, SMAN 9, SMAN 10, SMAN 11, SMKN 4, SMKN 5
2	Drs.. H. Bahruddin	SMAN 3, SMAN 4, SMAN 12, SMKN 1,
3	Dra. Hj. Noorhasanah, M.Pd.	SMAN 2, SMAN 7, SMAN 8, SMAN 13, SMKN 2 dan SMKN 3

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2012

b. Perencanaan Kegiatan Supervisi

Penyusunan program, baik yang bersifat tahunan, semester maupun bulanan atau bahkan mingguan merupakan bentuk perencanaan pengawas sebelum melakukan supervisor. Untuk masalah ini Pengawas dalam menyusun Program tahunan, semester, bulanan dan mingguan dibuat secara bersama-sama melalui Pokjawas. Penyusunan program tahunan, program semester maupun program bulanan bahkan program semester semua itu merupakan tugas rutin pengawas untuk membuatnya setiap awal tahun ajaran. Sebab program tersebut merupakan rujukan setiap saat bagi pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pembuatan program tersebut kami melakukannya secara Tim atau bersama-sama. Tim Pokjawas selalu melakukan kegiatan pembuatan program, karena itu merupakan rencana pokok yang dijabarkan oleh masing-masing pengawas, agar dalam melaksanakan supervisinya tidak ke luar dari ketentuan. Hal ini ditunjang dengan hasil observasi penulis, bahwa: semua pengawas memiliki program tahunan, semester dan bulanan hasil dari kesepakatan Pokjawas.

Selain program yang harus dimiliki pengawas sebelum melakukan supervisinya ke sekolah masih ada hal-hal yang dipersiapkan. Beberapa hal yang perlu disiapkan, yakni Surat Tugas, informasi/Pemberitahuan sebelum melaksanakan supervisi, Instrumen supervisi, dan Analisis data sebelumnya agar sebelumnya berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah. Kemudian menyiapkan format/instrumen supervisi, menyiapkan materi pembinaan, menyiapkan buku catatan, menyiapkan data supervisi sebelumnya. Sebelum melakukan kunjungan ke

sekolah dan atau observasi di kelas pihak sekolah selalu dihubungi lebih dahulu oleh pengawas.

Seiring dengan itu Pengawas terlebih dahulu harus mengetahui gambaran umum tentang lokasi/informasi tentang guru, tujuan supervisi, instrumen dipersiapkan dan disesuaikan dengan tujuan

Sebelum melakukan supervisi pengawas selalu menyiapkan format instrumen yang telah Pengawas sepakati untuk digunakan. Instrumen yang digunakan dalam melakukan supervisi, adalah format yang telah disepakati oleh tim pengawas Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin. Format tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Instrumen yang dipakai disesuaikan dengan tujuan supervisi yang akan dilakukan dan berdasarkan kesepakatan Pokjawas.

c. Pelaksanaan Pengawasan di Sekolah

Kunjungan sekolah dan observasi kelas oleh pengawas dijadikan sebagai kegiatan utama dalam melakukan supervisi. Supervisi dilakukan dua kali dalam setahun atau bisa kurang tergantung situasi dan kondisi sekolah, misalnya terbentur dengan kegiatan sekolah berupa ulangan-ulangan dan kegiatan lainnya. Kunjungan ke sekolah dan observasi kelas sesuai dengan program yang telah dibuat. Semua Pengawas telah melakukan dan melakukan penjadualan kunjungan ke sekolah, dan telah melaksanakannya, walaupun dalam satu tahun tidak semua sekolah dapat dikunjungi sesuai dengan jadwal dimaksud. Tetapi supervisi dilakukan minimal satu kali dalam setahun pada satu sekolah.

Dalam pandangan Kepala Sekolah selama ini pengawas telah melakukan kunjungan ke sekolah dan melakukan observasi di kelas sekali atau 2 kali dalam setahun. Kepala sekolah menghendaki sebaiknya lebih sering, terutama untuk melakukan pendampingan terhadap guru dalam proses pembelajaran. Adanya komunikasi yang intensif dengan Kepala Sekolah dan guru-guru di sekolah sangat diperlukan dan membantu guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi di antara kepala sekolah ada yang menyatakan bahwa supervisi yang dilakukan pengawas agama Islam dirasakan sangat kurang dalam 1 tahun mungkin hanya 1 kali atau tidak ada sama sekali.

Di mata guru, dalam melakukan kunjungan dan observasi di kelas tidak terlalu sering dilakukan, paling-paling sekali dalam setahun. Tetapi ada juga yang menyatakan, dalam satu semester sampai 3-4 kali kunjungan. Di antara guru menyatakan, supervisi yang dilakukan pengawas rata-rata enam bulan sekali bahkan satu tahun sekali, sebagian yang lain menyatakan disupervisi 1 kali dan yang lainnya menyatakan pernah disupervisi, namun sangat jarang sekali, tidak ada sekali dalam setahun.

Harapan para guru, pengawas lebih meningkatkan kinerjanya. Salah seorang guru PAI, yaitu Drs, H. Hamdani, M.Pd.I menyatakan:

”Pengawas perlu lebih sering lagi melakukan kunjungan, sehingga ketika ada permasalahan akan lebih mudah dikomunikasikan dan diselesaikan bersama. Kadang-kadang guru juga bingung harus berbuat apa untuk menyikapi masalah mereka dalam tugas sehari-hari. Selain berkonsultasi dengan kepala sekolah mereka juga sangat membutuhkan pandangan dari pengawas. Sebab pengawaslah yang lebih mengetahui problema guru, dan pengawas merupakan

petugas yang menaungi guru PAI di sekolah umum". (Wawancara dengan Drs. H. Hamdani, M.Pd.I, guru PAI pada SMAN 9 Banjarmasin, tanggal 3 Mei 2013).

Hasil pengamatan dan wawancara dengan pengawas membuktikan, bahwa Pengawas secara berkala memang sudah melakukan kunjungan ke sekolah, namun keadaannya tidak merata. Ada sekolah yang mendapatkan supervisi satu kali dalam 6 bulan, ada yang satu kali dalam 1 tahun dan bahkan ada yang beberapa tahun hanya sekali. Pada saat kunjungan ke sekolah ada yang hanya mencari data dan diskusi dengan guru dan ada yang langsung melakukan observasi di kelas pada saat guru sedang mengajar.

Salah seorang pengawas PAI yaitu Drs. Bahruddin menyatakan:

"Kami memang aktif melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah, tetapi tidak harus secara rutin pada sekolah tertentu, melainkan melihat kepada urgensinya. Kami melihat kebanyakan guru PAI sudah mampu dan terampil dalam mengajar. Mereka tidak menemukan hambatan yang mendasar dalam menjalankan tugasnya. Kepada mereka ini kami hanya memberikan bimbingan seperlunya secara tidak langsung, atau sekadar mencari data tertentu. Pengawasan lebih intensif dilakukan terhadap guru-guru PAI yang relatif baru, atau baru bertugas di tempat tertentu untuk membangun kounikasinya dengan sekolah tempat bertugas, karena pendekatan kepada mereka ini lebih banyak dilakukan secara individual". (Wawancara dengan Drs. H. Bahruddin, Pengawas PAI pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, tanggal 4 Mei 2013).

Jadi keaktifan para pengawas dalam menjalankan tugas tidak harus secara rutin melakukan kunjungan-kunjungan sekolah, melainkan melihat kepada urgensinya. Pengawasan dilakukan secara intensif ketika dianggap sangat perlu, misalnya untuk membimbing para guru junior yang baru diangkat yang mereka itu sangat membutuhkan bimbingan dari pengawas dan juga dari kepala sekolah tempatnya bertugas.

d. Pendekatan Supervisi

Dalam melakukan supervisi pengawas terkadang memilih pendekatan secara perorangan dan bisa juga dilakukan secara kelompok, kemudian melalui MGMP. Di antara teknik-teknik tersebut yang lebih sering dengan cara individu. Dalam pendekatan perorangan pengawas melakukan pembinaan terhadap guru dengan mengumpulkan hal-hal baru yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam pendekatan Kelompok pengawas memberikan arahan dan bimbingan tentang cara mengajar, cara mengelola kelas, menggunakan metode dan media serta mengatasi masalah. Hal yang sama juga dilakukan ketika ada kegiatan misalnya MGMP dan rapat sekolah/Madrasah.

Seorang pengawas menyatakan:

”Ketika kami (pengawas) melakukan supervisi dengan pendekatan individual umumnya guru sangat senang, sebab dengan cara individual guru-guru dapat mengeluarkan permasalahannya secara terbuka, lebih terperinci dan jelas tanpa rasa malu, apalagi jika pengawas aktif menanyakan kepada mereka. Hal-hal yang bersifat rahasia juga dapat mereka sampaikan langsung kepada pengawas. Sementara melalui pendekatan kelompok, sebagian guru agak malu mengemukakan persoalan yang dihadapinya, karena kadang-kadang ditertawakan oleh guru yang lain. Di antara guru berpendapat tidak semua masalah harus disampaikan kepada pengawas, cukup didiskusikan sesama guru saja masalahnya akan selesai”. (Wawancara dengan Drs. H. Bahruddin, Pengawas PAI pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, tanggal 4 Mei 2013).

Forum yang juga dirasa cocok dan efektif oleh pengawas dan guru dalam memberikan supervisi adalah melalui MGMP PAI. Melalui MGMP ini pengawas memberikan pelajaran, masukan, informasi dan bimbingan, baik bersifat pembinaan maupun pelatihan. MGMP menjadi forum penting bagi kegiatan bimbingan dan

pelatihan bagi guru-guru dalam hal model-model pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi dan sebagainya. Sekarang MGMP PAI yang merupakan bentukan dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin belum banyak dilakukan, karena pengawas belum bisa menyesuaikan program kepengawasan dengan program di MGMP. Ke depan guru PAI bersama-sama dengan pengawas akan lebih intensif dalam melakukan komunikasi guna mendiskusikan masalah-masalah yang dialami dalam pembelajaran PAI.

Bagi pengawas sendiri, dalam melakukan pembinaan lebih sering menggunakan pendekatan individual dalam rangka menjaga kerahasiaan. Supervisi individual lebih efektif, karena pengawas lebih leluasa menyampaikan arahan dan bimbingan, walaupun cara ini bagi sebagian pengawas dan guru dianggap kurang efisien, karena banyak menyita waktu. Melalui pendekatan individual guru PAI diajak berdiskusi tentang dunia pendidikan dengan harapan guru lebih terdorong mengungkapkan masalahnya dan dapat meningkatkan gairah dalam melaksanakan tugas dan selalu ingin memperbaiki diri.

Seorang Kepala Sekolah, dalam hal ini Drs. H. Muhammad Gazali, M.Pd.I mengharapkan:

”Di samping pendampingan dari seorang pengawas, guru hendaknya juga selalu diberikan pelatihan oleh pengawasnya tentang peningkatan wawasan kependidikan, misalnya melalui MGMP. Hal ini sangat penting karena keadaan masyarakat selalu bergerak dan berubah dan memungkinkan timbulnya kasus-kasus baru yang mengharuskan guru cakap dalam menghadapi dan memecahkan masalah tersebut. Apalagi dengan kemajuan era informasi dan teknologi sekarang ini seorang guru PAI harus selalu melihat dan mengikuti perubahan yang terjadi. Dengan demikian jika timbul permasalahan maka akan lebih mudah mengatasinya. Di sinilah pentingnya berbagi pengalaman dan pengetahuan

antara pengawas dan guru". (Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Gazali, M.Pd.I, Kepala SMAN 10 Banjarmasin tanggal 5 Mei 2013).

Selama ini cara pengawas meningkatkan wawasan guru dalam kependidikan adalah melalui diskusi atau perbincangan mereka di ruang kepala sekolah maupun ruang guru. Hal ini bagus, tetapi akan lebih efektif ditindaklanjuti dalam bentuk simulasi, praktik dan sebagainya. Model kepengawasan dengan teknik individual yang selama ini dilakukan pengawas sudah sangat baik dan perlu terus ditingkatkan. Di samping itu bimbingan terhadap guru-guru harus dilakukan secara berkelanjutan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan pengamatan, upaya yang dilakukan pengawas untuk meningkatkan wawasan guru secara tidak langsung sudah dilakukan dengan cara berdiskusi pada saat-saat tertentu yang tidak formal, terutama untuk perorangan. Tetapi secara formal untuk kelompok seperti melalui MGMP PAI jarang sekali dilakukan.

Seorang guru PAI menyatakan:

"Kebanyakan guru PAI menyatakan bahwa teknik supervisi yang dilakukan Pengawas hanya sebatas bincang-bincang, diskusi pada kesempatan tertentu. Misalnya pada saat kunjungan ke sekolah atau sehabis melakukan observasi di kelas dan dilakukan secara perorangan. Pengawas melakukan supervisi ke sekolah sangat kurang dan biasanya hanya dengan diskusi secara perorangan. Supervisi dilakukan pengawas hanya sekedar masuk ke sekolah setelah itu berbincang-bincang secara perorangan. Kunjungan ke sekolah dan observasi ke kelas agak kurang dan kalau melakukan supervisi lebih sering dengan cara individual". (Wawancara dengan Drs. H. Ahmad Rizqan, MPd.I, guru PAI pada SMKN 3 Banjarmasin, tanggal 7 Mei 2013).

Pengawas memang melakukan bimbingan secara khusus terhadap guru dalam masalah administrasi pembelajaran, cara mengajar, metode, buku pegangan

dan media pembelajaran. Bimbingan dilakukan di ruang kepala sekolah/ruang guru dengan cara diskusi perorangan. Bimbingan terhadap guru dalam masalah administrasi pembelajaran biasanya dilakukan di ruang kepala sekolah. dengan cara diskusi, tukar pendapat dan saran secara individual.

Salah seorang pengawas yaitu Drs. H. Herman Tarmidzi menyatakan:

"Kami (pengawas) secara berkala memberikan bimbingan secara individu, misalnya cara membuat silabus, satuan pelajaran, RPP, merencanakan model pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan metode dan media dan sejenisnya. Juga diajarkan tentang penyusunan indikator keberhasilan pengajaran. Intinya guru-guru diberikan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) pedagogik dan profesional sesuai dengan tugas mereka. Jika semuanya sudah memadai, maka disarankan untuk dipraktikkan oleh guru di saat menjalankan tugas. Jika guru mengalami kesulitan dalam menyempurnakannya atau membuatnya, maka pengawas berusaha untuk membimbingnya melalui diskusi dan tanya jawab agar guru tidak merasa digurui". (Wawancara dengan Drs. H. Herman Tarmidzi, Pengawas PAI pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, tanggal 10 Mei 2013).

Pengawas yang lain yaitu Drs. H. Bahruddin juga menyatakan;

"Tidak semua masalah yang dikonsultasikan dengan pengawas berkaitan langsung dengan pengajaran. Ada kalanya guru mengonsultasikan tentang masalah-masalah umum, seperti tentang kenakalan remaja, ada/banyaknya siswa yang malas atau enggan untuk shalat lima waktu padahal sudah merupakan kewajibannya, adanya anak/siswa yang nakal dan sebagainya. Terhadap masalah seperti ini kami memberikan bimbingan seperlunya, salah satunya dengan terus meningkatkan pengajaran dan pendidikan agama di sekolah, sebab kemungkinan anak demikian kurang mendapatkan bimbingan agama di rumah, jadi sekolah harus dapat diandalkan. Kalau bisa guru PAI bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah, bahkan kalau perlu menjalin komunikasi dengan orang tua siswa di rumah". (Wawancara dengan Drs. H. Bahruddin, Pengawas PAI pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, tanggal 5 Mei 2013).

Jadi para pengawas PAI sudah berusaha untuk memberikan berbagai arahan dan bimbingan kepada guru-guru PAI, baik dalam rangka membuka dan menambah

wawasan maupu mengenai keterampilan-keterampilan teknis yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Salah seorang Kepala Sekolah melihat bahwa pengawasan dan arahan yang dilakukan pengawas terhadap guru-guru sudah bagus. Dalam hal ini Drs. H. Muryadi,

MM menyatakan:

”Pengawasan oleh pengawas kepada guru PAI di sekolah kami sudah bagus dan berjalan lancar. Arahan tersebut dilakukan di ruangan tertentu dengan cara diskusi secara perorangan dan kelihatannya santai dan komunikatif. Kepala Sekolah lainnya menyatakan bahwa pengawas yang datang ke sekolah dalam melakukan supervisi lebih banyak berbincang-bincang saja kepada guru PAI, namun jarang melihat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas. Kami menyarankan, kalau bisa sesekali pengawas melihat langsung KBM di kelas. Tetapi bagi guru PAI lebih senang jika pengawas tidak melihat langsung caranya mengajar di kelas, karena merasa canggung dan seolah diawasi”. (Wawancara dengan Drs. H. Muryadi, MM., Kepala SMKN 4 Banjarmasin tanggal 20 Mei 2013).

Sementara itu beberapa orang guru menyatakan bahwa biasanya setelah melakukan observasi kelas, pada saat di ruangan guru atau kepala sekolah pengawas memberikan bimbingan dengan diskusi atau berbincang-bincang. Setelah itu baru pengawas menyampaikan saran.

Di antara guru yaitu Drs. H. Hamdani, M.Pd.I menyatakan:

”Pembinaan atau arahan dari pengawas sudah cukup baik Biasanya arahan diberikan setelah selesai pembelajaran berlangsung. Arahan yang diberikan misalnya dalam hal penggunaan papan tulis, cara membangun semangat siswa dalam belajar, cara menarik perhatian agar tidak bosan, dan sebagainya”. (Wawancara dengan Drs. H. Hamdani, M.Pd.I, guru PAI pada SMAN 9 Banjarmasin, tanggal 3 Mei 2013).

Guru lainnya yaitu Dra. Mariatul Qibtiyah, menyatakan:

Pengawas sesekali melihat proses pembelajaran dan memberikan masukan, dengan menunjukkan letak kesalahan, terutama dalam hal perangkat pembelajaran

dan biasanya dilakukan di ruang kepala sekolah/wakil kepala sekolah secara perorangan. Kami dari guru-guru PAI sebenarnya menginginkan pembinaan yang lebih intensif dari pengawas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. (Wawancara dengan Dra. Mariatul Qibtiyah, guru PAI pada SM KN 4 Banjarmasin, tanggal 10 Mei 2013).

Berdasarkan pengamatan, kedatangan pengawas ke sekolah biasanya membawa daftar isian untuk diisi oleh guru PAI. Ketika selesai melakukan observasi kelas dilanjutkan dengan diskusi dan berbincang-bincang di ruang kepala sekolah atau ruang guru dan dilakukakan secara perorangan atau individu.

Bentuk lain dari supervisi yang diterapkan adalah teknik supervisi secara tidak langsung, artinya seorang pengawas melakukan kunjungan ke sekolah. Pengawas hanya menemui dan berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah tanpa bertemu dengan guru yang disupervisi. Cara begini dilakukan jika keperluannya hanya untuk mengumpulkan data. Tetapi ketika pengawas melakukan bimbingan individual, maka pengawas berusaha untuk bertemu langsung dengan guru PAI. Kebanyakan guru juga menekankan sebaiknya setiap pengawas mencari data tentang pembelajaran guru dengan bertemu langsung guru PAI di sekolah dan langsung mengadakan tinjauan kelas, supaya dapat melihat dari dekat praktik pengajaran oleh guru.

Pengawas yang berkunjung ke sekolah melakukan supervisi akademik tanpa melakukan observasi kelas dianggap sebagai hal yang positif saja, sebab kalau setiap datang ke sekolah melakukan observasi ke kelas dikhawatirkan guru akan jenuh dan *ewuh pakewuh*. Supervisi cukup dengan memberikan pengarahan kepada guru di ruang guru/ruang kepala sekolah saja. Yang penting pertemuan antara pengawas dengan guru dilakukan cukup sering, misalnya minimal 2 kali dalam 1 semester.

e. Tindak Lanjut Supervisi

Para pengawas yang melakukan supervisi terjadap guru PAI di masing-masing sekolah, kemudian menindaklanjuti hasil supervisinya. Setelah dilakukan supervisi melalui observasi / kunjungan kelas, diskusi dan pengarahan, pengawas melakukan pencatatan-pencatatan. Data dan masalah yang ditemukan oleh pengawas diklassifikasikan ke dalam kelompok masalah. Ada guru-guru PAI yang disupervisi mengalami masalah/kelemahan dalam hal membuat satuan pelajaran, metode mengajar, melakukan *pre test*, *middle test* dan *final test*, penggunaan media, penguasaan materi serta kemampuan guru dalam mengelola kelas, dan sebagainya. Bagi pengawas, setiap melakukan supervisi maka hasil temuan yang diperoleh selalu dicatat, baik yang bersifat kekurangan atau kelebihan. Setelah semua data tersebut terhimpun selanjutnya dipilah-pilah dan diklassifikasikan ke bagian mana seharusnya data itu terkait. Apakah terkait dalam hal metode, media, materi atau kemampuan guru dalam menguasai kelas, dan sebagainya Menurut pengawas, hampir semua guru PAI, terutama guru yunior atau baru diangkat mengalami problema dalam aspek-aspek di atas.

Setelah pengawas melakukan analisis hasil supervisinya, maka pengawas berusaha melanjutkannya dengan supervisi klinis, yaitu menawarkan cara untuk mengatasi masalah yang dialami guru. Solusi itu disampaikan dalam bentuk diskusi bersama guru dan memberikan saran sehingga permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusinya. Sekiranya guru kesulitan dalam menjalankan saran yang

ditawarkan, maka dipersilakan guru bersangkutan menggunakan cara pendekatannya sendiri sesuai dengan kemampuan guru bersangkutan.

Apabila ada hal-hal yang kurang tepat dilakukan oleh guru maka bersama pengawas hal itu didiskusikan dan disarankan untuk diperbaiki. Seiring dengan itu komunikasi dijalin bersama dengan Kepala Sekolah. Setelah pengawas melakukan supervisinya, kepala sekolah selalu diberikan informasi secara lisan maupun laporan tertulis tentang keadaan, masalah dan perkembangan guru dalam melaksanakan tugasnya. Guru diberitahu tentang hasil observasi, diberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif, dan disuruh menandatangani. Jika ditemukan kekurangan baik dalam perangkat mengajar maupun cara mengajar, maka pada kesempatan itu pengawas menyarankan kepada guru untuk memperbaiki diri dan kecakapannya dalam mengajar.

f. Memotivasi Guru PAI

Pengawas melihat guru selalu dihadapkan kepada tantangan tugas yang semakin tidak ringan. Banyak persoalan baru yang muncul, dari perubahan kurikulum, perubahan buku pegangan, perkembangan model pembelajaran, hingga kepada tuntutan perlunya pembelajaran dengan pendekatan atau menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Oleh karena itu guru PAI memerlukan dorongan semangat (motivasi) dan pendampingan dari pengawas secara berkelanjutan. Bentuk motivasi yang dilakukan pengawas adalah selalu memberikan semangat dan bimbingan secara terus menerus, supaya guru tetap proaktif dalam mengajar. . Di antara guru PAI ada yang sudah mendekati pensiun, merasa dirinya

sudah masuk kotak dan tidak mungkin lagi mengembangkan karier. Terhadap mereka ini pengawas memotivasi agar dalam belajar tidak ada istilah berhenti atau pensiun.

Pengawas juga sering berbincang-bincang sekitar tugas dan tanggung jawab masing-masing PAI. Tugas mereka sebagai guru PAI sangat mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Tugasnya itu merupakan ladang untuk beramal jariah sebanyak-banyaknya, yang pahalanya tidak akan putus selama-lamanya. Melalui penanaman kesadaran sepiritual seperti itu terbangun motivasi dan gairah bagi guru PAI untuk menjalankan tugasnya lebih baik lagi.

Di antara pengawas juga memberi arahan dan mengingatkan guru PAI bahwa bekerja sebagai guru adalah salah satu bentuk ibadah mahdhah yang sangat tinggi nilai pahalanya. Sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat, guru PAI diminta untuk memberikan yang terbaik kepada anak didik, lebih-lebih sekarang pemerintah sudah sangat memperhatikan para guru, sehingga gaji dan penghasilan guru sudah lebih meningkat, baik dari gaji maupun tunjangan sertifikasi, semua ini jauh berbeda dengan gaji-gaji guru di masa lalu. Apalagi dibandingkan dengan gaji guru honorer dan guru mengaji yang ada di masyarakat yang sangat kecil. Jadi guru PAI yang berstatus PNS harus lebih banyak beryukur dengan cara mengabdikan secara tulus dan optimal, dengan ditandai kinerja yang lebih baik.

Terhadap guru-guru PAI yang berprestasi, pengawas tidak dapat memberikan imbalan berupa materi karena tidak memiliki anggaran di bidang itu. Pengawas memilih memberikan reward (ganjaran) atau penghargaan berupa pujian serta pemberian nilai yang tinggi secara kuantitatif dan kualitatif pengawas juga

memberikan informasi dan mengusulkan kepada Kepala Seksi PAI Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin agar guru PAI tersebut diperhatikan kariernya, misalnya diberikan kesempatan lebih luas mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar daerah, dan suatu saat jika yang bersangkutan berminat, juga diangkat sebagai pengawas PAI. Guru bersangkutan juga diminta mempertahankan dan meningkatkan lagi.

Namun di antara guru PAI menyatakan, penghargaan pengawas terhadap mereka meskipun sebatas pujian masih kurang. Sehabis Pengawas melakukan supervisi dan memberikan penilaian, guru tidak pernah diberikan pujian, hanya berbincang-bincang, setelah itu pengawas pulang.

g. Ganjaran dan Sanksi

Ketika pengawas melakukan supervisi terhadap guru PAI, baik yang sudah menjalankan tugas dengan baik pengawas memberikan pujian dan penghargaan secara lisan sambil mendorong agar terus ditingkatkan. Tetapi tidak semuanya melaksanakan pembelajaran secara benar. Ada yang kesiapan administrasi dan perangkat administrasinya lemah, tidak membuat satuan pelajaran dan sebagainya. Terhadap mereka ini pengawas mengenakan sanksi dengan cara menyuruh guru PAI melengkapinya, karena guru yang tidak memiliki administrasi/perangkat pembelajaran dianggap proses pembelajaran yang dilaksanakan tidak berkualitas.

Ada juga pengawas yang memberikan sanksi peringatan yang agak keras dan apabila peringatan sudah pernah disampaikan, diminta untuk melengkapi apabila mau naik pangkat. Salah satu persyaratan kenaikan pangkat, para guru PAI harus

melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan dilanjutkan dengan tanda tangan pengawas. Begitu juga ketika guru mau memenuhi persyaratan sertifikasi, makatada tangan pengawas juga diperlukan.

Salah seorang pengawas, yaitu Drs. H. Bahruddin mengatakan:

"Kami para pengawas sering serkali dimintai tanda tangan oleh para guru PAI untuk berbagai keperluan. Biasanya kami tidak langsung menandatangani, melainkan lebih dahulu memberikan pengarahan akan tugas dan tanggung jawabnya. Bagi guru yang dianggap kurang disiplin diminta agar lebih disiplin, dan bagi yang kurang terampil mengajar dianjurkan lebih rajin belajar dan mencari pengalaman dari guru lainnya yang lebih senior. Lebih-lebih mereka mengajar di sekolah umum, maka penampilan dan kemampuan harus meyakinkan. Kami pengawas dapat menolak tanda tangan jika persyaratan mereka belum terpenuhi." (Wawancara dengan Drs. H. Bahruddin, Pengawas PAI pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, tanggal 5 Mei 2013).

Pengawas lainnya tidak memberikan sanksi terlalu jauh. Hanya di masa sertifikasi sekarang ini ketika guru PAI meminta penandatanganan usulan, pengawas menunda sebentar sambil menunggu perangkat pembelajaran selesai dibuat, disertai saran agar cara-cara mengajar lebih diperbaiki dan ditingkatkan. Sedangkan sanksi lain oleh pengawas diserahkan kepada pihak kepala sekolah atau pihak lain yang lebih berwenang.

"Kami tidak memberikan sanksi yang keras. Rasa kada purun atau tidak tega sebab sebelum menjadi pengawas kami juga merasa suka dukanya sebagai guru PAI di sekolah umum. Jadi kami banyak memberi dorongan atau motivasi disertai arahan saja supaya guru PAI lebih meningkatkan profesionalitasnya, tanpa terlalu bergantung kepada pembinaan dari pengawas". (Wawancara dengan Dra. Hj. Noorhasanah, M.Pd.I, Pengawas PAI Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, tanggal 20 Mei 2013),

Di mata seorang kepala sekolah, sanksi tidak perlu dilakukan oleh pengawas, sebab guru-guru PAI selalu menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan. Cara mempersiapkan pelajaran dan cara mengajar sudah sesuai walaupun di sana sini masih terlihat kelemahan. Begitu juga kelengkapan mengajar guru tidak ada masalah walaupun perlu lebih ditingkatkan lagi. Kepala sekolah lebih menekankan peran pengawas untuk membantu, membimbing sebagai mitra bagi guru dalam menjalankan tugas.

h. Perbaikan Pengawasan

Pengawas, kepala sekolah dan guru PAI dalam menjalankan kepengawasan pengawas ke depan menyadari perlunya bekerjasama dengan MGMP untuk menjalin komunikasi yang lebih akrab dan sebagai sarana untuk bekerjasama dengan guru-guru dalam rangka peningkatan mutu guru dan pengajaran Pendidikan Agama Islam. Supervisi yang dilakukan oleh pengawas sebaiknya lebih banyak secara nonformal dan selalu mendampingi guru-guru secara berkelanjutan. Sering memberikan pelatihan sendiri dan mengikutkan guru dalam pelatihan agar guru-guru menjadi tenaga pendidik yang profesional. Pengawas dituntut selalu menjalin hubungan yang baik dengan Kepala Sekolah untuk sama-sama merumuskan dan melaksanakan pembelajaran yang terbaik. Jika memungkinkan pengawas perlu mengadakan studi banding tentang kepengawasan di sekolah dan daerah lain.

Ditekankan pula bahwa seorang pengawas harus berwawasan yang luas tentang supervisi, dengan jenjang kependidikan minimal S1 dan sebaiknya S2, mempunyai komitmen yang tinggi akan kepengawasan, berwawasan luas secara teori dan praktik, teknis dan klinis, rajin dan disiplin, berkepribadian yang baik, yang dapat dicontoh dan diteladani. Sebaiknya pengawas itu harus melalui penjenjangan karier kepala

sekolah lebih dahulu supaya lebih matang wawasan tentang kepengawasan. Sebagai Kepala Sekolah dia telah berpengalaman melakukan supervisi terhadap guru-guru dan merupakan tugas rutin keseharian. Jika seorang pengawas mengikuti jenjang seperti ini maka tentunya dia akan lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Sebaiknya, jika pengawas tidak berlatar belakang kepala sekolah kemungkinan kurang merasa yakin dengan tugasnya dan merasa guru lebih menguasai dalam hal proses pembelajaran ketimbang pengawas.

Disarankan pula agar orang yang direkrut sebagai pengawas memiliki pengalaman yang memadai, minimal berpengalaman sebagai guru selama 8 tahun dan berpengalaman sebagai kepala sekolah minimal selama 4 tahun dan menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang supervisi

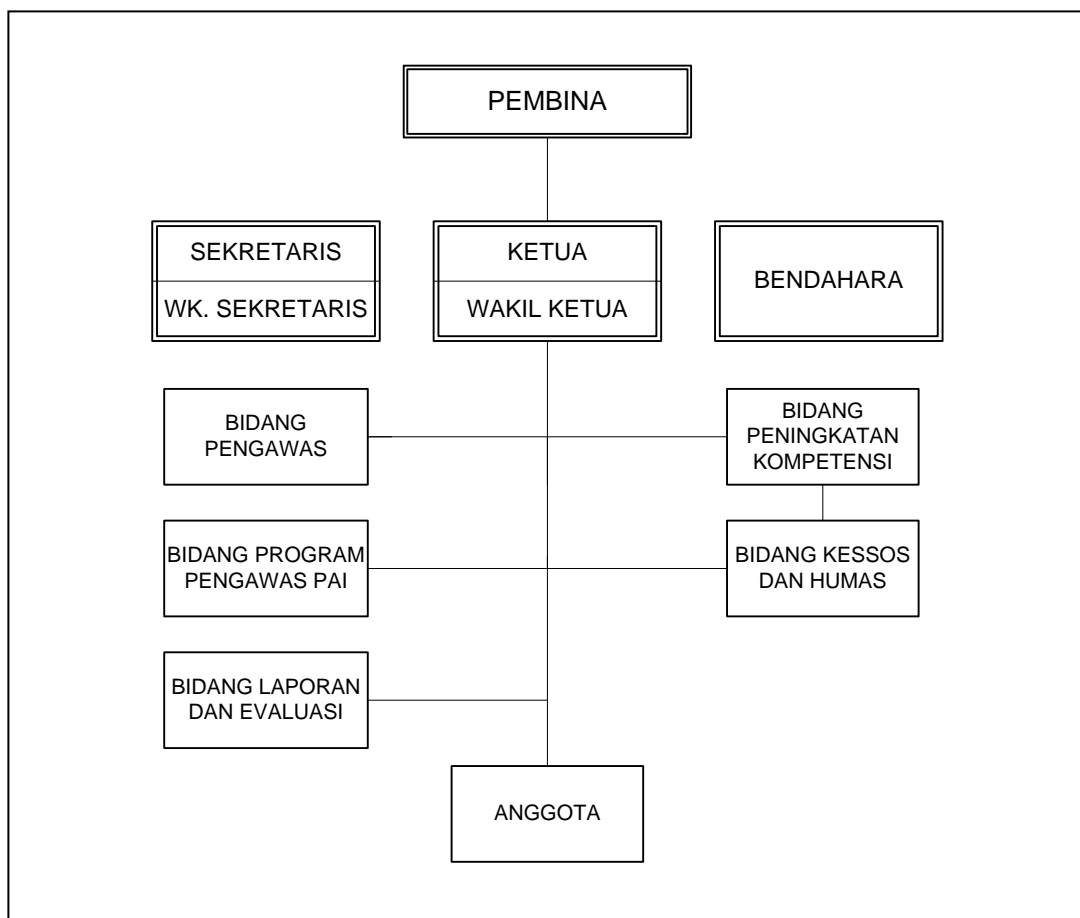
Di samping itu usia juga jangan terlalu tua ketika memulai karier sebagai pengawas, hal ini karena menurut mereka pekerjaan sebagai pengawas memerlukan kesehatan yang prima dan stamina yang tinggi, sebab banyak sekolah yang harus didatangi. Pengawas bisa saja tidak melewati pengalaman sebagai Kepala Sekolah asal karier sebagai pengawas bukan sebagai pelarian atau ingin memperpanjang masa tugas, biasanya dari tenaga struktural. Kesan selama ini pengawas sebagai karier terakhir sebelum pensiun.

2. Peran Pengawas terhadap Guru PAI di Kota Banjarmasin

a. Peningkatan Kinerja Pengawas

Sejalan dengan pelaksanaan tugas-tugas kepengawasan sebagaimana dikemukakan di atas, para pengawas berusaha meningkatkan peran mereka sendiri

dan peran kepengawasan kepada guru-guru madrasah dan PAI pada sekolah umum melalui organisasi yang mereka bentuk sendiri berupa Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) di bawah pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Selengkapnya struktur organisasi Pokjawas Kota Banjarmasin digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 4: Struktur Organisasi Pokjawas PAI Kota Banjarmasin

Pembina Pokjawas terdiri dari 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin; 2) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah; 3) Kepala Seksi Pendidikan

Agama Islam. Ketua Pokjawas saat ini (2010-2015) diduduki oleh Drs. H. Herman Tarmizi, dibantu oleh Wakil Ketua M. Aziddin Noor, S.Pd.I, Sekretaris Drs. H. Bahruddin, Wakil Sekretaris Drs. Arifinsyah dan Bendahara: St. Latifah, S.Pd.I.

Pokjawas memiliki lima koordinator. Koordinator Bidang Pengawas Madrasah diduduki oleh Salafuddin Fitri, S.Ag, M.Pd.I dan H. Abdul Basith, S.Ag. Koordinator Bidang Program Pengawas PAI oleh Dra. Hj. Noorhasanah dan Hj. Zuhriah, S.Pd/M.Pd. Koordinator Bidang Laporan dan Evaluasi diduduki oleh Abdul Hayat, S.Pd.I. dan Drs. H. Rusdiansyah, M.Pd. Koordinator Bidang Peningkatan Kompetensi: diduduki oleh Idram, S.Pd.I dan Dra. Siti Murni. Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial dan Humas diduduki oleh Dra. Hj. Najmi Haderiani, MA dan Heny Widyawati, S.Pd. Sedangkan para anggota terdiri dari seluruh Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI di Kota Banjarmasin.

Pokjawas Kota Banjarmasin ini ke dalam mengupayakan agar sesama pengawas memiliki kerjasama dan kesepahaman dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan. Mereka berusaha meningkatkan motivasi, hal ini karena profesionalitasnya dengan saling bertukar informasi, pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya ke luar mereka menjalin komunikasi dengan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah yang menjadi wilayah supervisi, dengan membangun hubungan dengan para kepala sekolah dan guru-guru PAI. Mereka juga dapat menghubungkan antara kepala sekolah/madrasah dan guru PAI dengan pihak kepala Kantor Kementerian Agama kota Banjaramsin ketika mereka memerlukan suatu informasi,

bimbingan dan kejelasan. Pada saat bersamaan para pengawas yang tergabung dalam Pokjawas ini secara intensif melakukan pembinaan terhadap guru-guru PAI.

b. Pembinaan Guru

Keberadaan pengawas di sekolah sangat berperan dan turut menentukan kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam di sekolah. Selama ini perannya dalam membina dan membimbing para guru, Pengawas dijadikan sebagai tempat bertanya dan menyampaikan keluhan ketika ada masalah pembelajaran bagi guru PAI.

Salah seorang guru PAI yaitu Dra. Mariatul Qibtiyah menyatakan:

”Selama 2 tahun terakhir ini pengawas selalu datang ke sekolah kami. Memang mereka tidak melakukan kunjungan setiap bulan, tetapi dalam satu semester ada 2 sampai 3 kali kunjungan. Sese kali kami juga yang mendatangi pengawas di Kanator Kemeneterian Agama Kota Banjarmasin. Dalam kesempatan itu kami minta bimbingan dalam hal pengajaran serta minta informasi-informasi baru yang mungkin diketahui oleh pengawas, seperti peraturan perundang-undangan. Sering yang kami butuhkan adlaah bimbingan dalam hal beban mengajar, melaksanakan pengajaran dan evaluasi. Menurut kami peran pengawas sangat membantu dalam meningkatkan profesi guru dalam tugas sehari-hari serta untuk pengembangan karier”. (Wawancara dengan Dra. Mariatul Qibtiyah guru PAI pada SMKN 4 Banjarmasin, tanggal 15 Mei 2013).

Tidak bisa dipungkiri lagi sangat berperan terutama dalam melakukan pembinaan terhadap guru-guru. Bagaimana pun masih ada di kalangan guru yang belum memahami cara mengajar yang benar mulai dari pemilihan metode maupun penggunaan media. Maka di sinilah peran pengawas untuk membantu guru.

Kehadiran pengawas di sekolah sangat diperlukan dalam rangka melihat lebih jauh pelaksanaan pengajaran PAI oleh guru-guru. Selanjutnya melakukan

pembinaan kepada kami guru-guru agar lebih mampu dalam mengajar. Hal ini juga ditunjang oleh hasil observasi peneliti, bahwa ketika pengawas menjalankan tugas dan kewajibannya di sekolah secara maksimal, maka sangat terlihat perannya di sekolah. Pihak sekolah terutama guru-guru PAI sangat mengharapkan keberadaan pengawas di sekolah

Namun pada kenyataannya pengawas belum dapat memaksimalkan perannya di sekolah. Seorang Kepala Sekolah (T), menyatakan bahwa pengawas PAI masih dirasakan kurang sekali perannya di sekolah. Hampir sama dengan pernyataan beberapa orang guru bahwa Pengawas kurang banyak memberikan deskripsi pengembangan PAI di sekolah. Belum terlihat seorang pengawas berperan di sekolah termasuk di MGMP untuk memberikan pembinaan dan pelatihan bagi guru PAI.

Memang banyak pengawas yang sekedar mengawasi pada saat pembelajaran berlangsung dan memberikan penilaian tentang perangkat pembelajaran, namun belum terlihat bagaimana ide-ide untuk meningkatkan potensi guru.

b. Bentuk Kerjasama

Komunikasi antara Pengawas dengan pihak sekolah, khususnya dengan Kepala Sekolah dan guru-guru PAI dalam rangka menunjang kelancaran supervisi yang dilaksanakan Pengawas sudah berjalan, meskipun belum optimal. Bentuk komunikasi yang selama ini diterapkan dalam rangka pelaksanaan supervisi beberapa kepala sekolah dan guru menyatakan ada yang dilakukan melalui surat, melalui pertemuan tatap muka atau kunjungan. Sekolah selalu melakukan komunikasi dengan pihak pengawas apalagi ketika pengawas akan melakukan kunjungan sekolah maupun

observasi kelas. Kepala sekolah memfasilitasi dengan menyediakan ruang kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk digunakan pengawas memberikan pengarahan kepada anak buahnya. Di samping itu sekolah juga selalu minta masukan kepada pengawas untuk kemajuan pengajaran khususnya Pendidikan Agama Islam. Jadi selama ini hubungan sekolah dengan pengawas cukup baik dan setiap berkunjung ke sekolah selalu diterima dengan baik.

Dalam melakukan supervisinya pada umumnya Pengawas selalu datang langsung ke sekolah. Komunikasi antara pengawas, guru dan kepala sekolah berjalan lancar dan secara umum tidak ada masalah. Pengawas selalu diposisikan sebagai mitra dalam bekerja, saling memberikan masukan satu sama lain untuk kemajuan pendidikan, tidak diposisikan sebagai pengawas yang ditakuti dan dijauhi. Ketiga pihak (pengawas, kepala sekolah dan guru PAI) menjalankan tugas dan fungsinya secara proporsional.

Salah seorang pengawas yaitu Drs. H. Bahruddin mengatakan;

"Ada kalanya kami (pengawas) mengundang guru-guru PAI ke Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin karena ada yang dikonsultasikan, dan bisa pula para guru PAI secara bersama-sama mengundang pengawas untuk bertemu melalui forum MGMP. Ketika ada peraturan perundang-undangan, pedoman kerja dan sejenisnya, biasanya pengawas lebih dahulu mengetahuinya, kemudian diinformasikan kepada para guru PAI". (Wawancara dengan Drs. H. Bahruddin, Pengawas PAI pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, tanggal 5 Mei 2013).

Pengawas tidak berkecenderungan untuk melakukan inspeksi secara mendadak. Hal ini dimaksudkan agar waktu untuk pertemuan antara pihak sekolah, guru dan pengawas dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan

mengajar belajar siswa. Oleh karena itu sebelum pengawas melakukan kunjungan ke sekolah guru PAI sudah diberitahu sebelumnya agar mempersiapkan perangkat pembelajaran. Hanya sesekali pengawas datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Namun ada juga di antara guru yang menyatakan, berdasarkan pengalaman yang dialaminya pengawas sering tidak memberitahu jika mau datang ke sekolah.

Menyikapi hal ini guru PAI menyatakan bersikap biasa-biasa saja, tidak terkejut, malah kesempatan itu digunakan untuk menyampaikan berbagai permasalahan untuk dicarikan solusinya bersama. Namun guru PAI lebih menginginkan pengawas memberi tahu rencana kunjungannya, supaya guru berada di tempat dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk dikonsultasikan. Kalau pengawas datang mendadak dikhawatirkan pertemuan itu tidak efektif, sebab tanpa persiapan waktu dan materi yang akan dikonsultasikan.

Meskipun demikian, ada juga salah seorang guru PAI yang meminta untuk tidak disebutkan namanya memberikan pernyataan agak berbeda, bahwa komunikasi Pengawas dengan pihak sekolah kurang baik, hal ini dapat dibuktikan dengan jaranginya kedatangan Pengawas ke sekolah dan kalau mau datang pengawas tidak pernah memberitahu sebelumnya.

Namun bagi pengawas hal ini tidak dijadikan indikator kurang baiknya hubungan. Itu hanya karena kesibukan pengawas sendiri, serta jauhnya jarak, sehingga tidak semua sekolah dapat didatangi dengan lebih sering. Respons guru dan kepala sekolah pada saat kunjungan ke sekolah dan observasi di kelas umumnya sangat baik karena pengawas adalah mitra kerja dari guru/kepala sekolah. Malah

kehadiran pengawas di sekolah selalu diharapkan dan dinanti-nantikan oleh guru PAI dan kepala sekolah. Pada intinya sekolah dan guru PAI menghargai kedatangan pengawas baik secara formal maupun nonformal karena itu merupakan kewajiban pengawas sekaligus kebutuhan sekolah dan guru PAI untuk selalu disupervisi. Mereka meyakini bahwa semua itu adalah untuk kemajuan sekolah khususnya dan pendidikan umumnya.

Dalam pandangan kepala sekolah jika pengawas lebih sering memberikan supervisi kepada guru PAI, maka kualitas, kemampuan atau kompetensi guru PAI lebih meningkat, dan hal ini sekaligus mengurangi beban kepala sekolah dalam membina mereka. Apalagi guru PAI mengasuh mata pelajaran PAI yang khas yang mana kepala sekolah kesulitan dalam memberikan bimbingan tentang cara mengajar yang baik, maka peran pengawas sangat penting, sebab hal itu merupakan domain pengawas PAI. Mengingat urgensinya, maka pihak sekolah juga mempertanyakan jika pengawas jarang datang mengunjungi mereka. Mereka menduga pengawas lebih banyak melakukan supervisi di madrasah, bukan di sekolah umum, padahal menurut kepala sekolah supervisi di sekolah umum lebih penting, sebab pendidikan PAI di sekolah umum lebih sedikit dibandingkan madrasah. Kalau di madrasah (MI/MTs/MA) pendidikan agamanya sudah banyak dan bervariasi, jadi kalau kurang disupervisi tidak apa-apa, karena kepala sekolahnya juga mengerti agama. Berbeda dengan sekolah umum di mana kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya berlatar belakang pendidikan umum atau kejuruan non agama.

Tetapi bagi pengawas tidak ada perbedaan urgensi antara mengawas di sekolah umum dengan di madrasah. Kalau di madrasah lebih banyak yang supervisi bukan hanya masalah akademik akan tetapi juga menyangkut administrasi dan manajerial. Sedangkan di sekolah umum yang sasaran pengawasannya terbatas kepada guru PAI saja, maka yang disupervisi hanya masalah akademik.

Senada dengan beberapa ungkapan di atas, respon sekolah dan guru-guru sangat positif terhadap pengawas. Hanya saja pengawas yang masih belum maksimal memanfaatkan respon tersebut. Agar respon dan kebutuhan guru dapat ditindaklanjuti oleh pengawas, maka pihak sekolah dan guru menyatakan bahwa komitmen pengawas terhadap tugasnya harus lebih tinggi, dan wawasan pengawas tentunya harus lebih luas dari guru-guru karena mereka bertugas membimbing para guru.

Di antara guru PAI memberikan penilaian bahwa wawasan Pengawas dari Kementerian Agama selama ini sudah lumayan, namun masih perlu ditingkatkan dalam artian harus lebih memahami tentang guru sehingga akan mudah melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Guru juga sepakat jika semua pengawas meningkatkan kompetensinya sebagai pengawas, misalnya dengan melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2, sebab semakin lama para guru PAI juga sudah menempuh jenjang pendidikan S2. Agak janggal kalau yang mengawasi hanya berpendidikan S1 sedangkan yang diawasi S2.

Standar pendidikan yang lebih tinggi ini diakui oleh pengawas dan guru. Sebagai seorang Pengawas sebaiknya memiliki standar pendidikan S2. bahwa pengawas harus lebih luas wawasannya daripada guru, maka sebaiknya standar

pendidikan pengawas S2. Di antara Kepala Sekolah yang diwawancarai juga menyatakan seharusnya standar pendidikan Pengawas sebaiknya S2. Di masa lalu S1 sudah cukup tetapi sekarang perlu lebih ditingkatkan lagi.

Sementara itu Kepala Sekolah lainnya menekankan bahwa di samping Pengawas memiliki standar pendidikan S2, seorang pengawas harus memiliki pengalaman sebagai Kepala Sekolah atau pengalaman mengajar minimal 10 tahun. Pengawas juga aktif dalam berbagai pelathan supervisi, dan harus selalu mengikuti perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan baik menyangkut kurikulum maupun keadaan masyarakat itu sendiri. Dengan begitu kecakapan pengawas akan lebih terjamin dan komprehensif. Apa saja masalah yang dihadapi sekolah dan apa saja bimbingan yang dibutuhkan guru maka pegawai dapat memberikan solusinya.

3. Kendala Pengawasan terhadap Guru PAI di Kota Banjarmasin

a. Perbedaan Kementerian

Kebijakan pemerintah selama ini, untuk guru PAI yang bertugas di sekolah umum, pengawasnya berasal dari Kementerian Agama. Kondisi demikian, bagi sebagian kepala sekolah, pengawas dan guru tidak dirasakan sebagai suatu yang ideal.

Beraitan dengan hal ini Drs. H. Muhammad Gazali, M.Pd.I mengatakan;

”Di kalangan kami para kepala sekolah, ada yang berpandangan bahwa idealnya pengawas untuk guru PAI yang diangkat dan bertugas di sekolah umum hendaklah berasal dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Tujuannya agar memudahkan koordinasi, juga secara hierarkis kedudukannya lebih kuat karena berada dalam naungan departemen yang sama. Guru yang diawasi oleh pengawas dari instansinya sendiri akan lebih berpengaruh terutama dalam hal

penilaian dan tindak lanjutnya. Kalau berbeda departemen sebagaimana yang berjalan selama ini dikhawatirkan ada guru PAI yang diawasi akan mengabaikan pengawasnya. Menurut kami masalah ini penting untuk diwacanakan, mengingat persentasi kehadiran pengawas PAI di sekolah umum khususnya SMA/SMK menjadi sangat minim dikarenakan perbedaan instansi ini. Minimnya kehadiran pengawas sudah banyak dirasakan". (Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Gazali, M.Pd.I, Kepala SMAN 10 Banjarmasin tanggal 15 Mei 2013).

Di kalangan sebagian guru juga berpendapat demikian, bahwa penyebab kurang maksimalnya pengawas melakukan supervisi bagi guru PAI mungkin disebabkan perbedaan Departemen. Oleh karena itu lebih baik baik pengawas dimaksud diangkat oleh Departemen yang sama atau satu atap.

Bagi sebagian guru PAI sebaiknya pengawas itu diangkat dari kalangan guru PAI sendiri oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kalau bisa mereka yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun dan bukan dari seseorang yang lama bertugas di jajaran struktural atau hanya ingin memperpanjang masa pensiun. Kesamaan profesi dan pengalaman sebagai guru akan lebih menjamin kualitas pengawasan, sebab guru yang diangkat sebagai pengawas akan tahu suka duka menjagi guru PAI di Departemen Pendidikan Nasional.

Tetapi sebagian pengawas dan guru PAI tidak mempermasalahkan perbedaan departemen ini, karena yang diawasi ini adalah guru-guru PAI. Pengawas dari Kementerian Agama lebih memiliki kompetensi di bidang ini. Sama halnya dengan mata pelajaran umum di madrasah, misalnya matematika, IPA, IPS dan sejenisnya, pengawasnya juga berasal dari departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengawasan silang ini merupakan sebuah keniscayaan, karena di sekolah umum diajarkan agama dan di sekolah agama diajarkan mata pelajaran umum. Kedua departemen ini tidak

mesti dipisahkan tanpa hubungan sama sekali, sebab sama-sama banyak bergerak di bidang pendidikan. Hanya saja disarankan agar lebih fokus, pengawas akademik perlu dipisahkan dengan pengawas manajerial. Artinya ada pengawas yang khusus mengawasi guru PAI saja, ada pula pengawas yang fokus mengawasi aspek manajerial. Selama ini keduanya bercampur baur, pengawas terhadap sekolah umum diarahkan sebagai pengawas akademik guru PAI, sedangkan pengawas terhadap madrasah mencakup pengawasan manajerial, akibatnya tugas kepengawasan menjadi beragam dan terlalu padat, sehingga kurang terfokus.

b. Jumlah Sekolah yang Diawasi

Bagi para pengawas, banyaknya jumlah sekolah dan guru PAI yang harus disupervisi menjadi kendala untuk menjalankan pengawasan secara optimal. Beberapa pengawas yang diwawancarai menyatakan bahwa sekarang ini terlalu banyak sekolah dan guru-guru yang harus diawasi sehingga kepengawasan tidak maksimal. Selain mengawasi madrasah, mereka juga harus mengawasi sekolah umum dan kejuruan. Jaraknya memang ada yang relatif dekat dengan tempat tinggal pegawai, tetapi ada juga yang cukup jauh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) Nomor 39 tahun 2009 tentang Kepengawasan, seorang pengawas membina guru 40-60 guru. Bagi para pengawas jumlah ini masih terlalu besar, idealnya hanya 20 hingga 25 orang saja.

Berkaitan dengan hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin mengatakan:

”Jumlah pengawas madrasah dan pengawas PAI selama ini masih kurang, hanya ada 10 orang, seharusnya 20 orang. Hal ini mengingat pengawas madrasah dan pengawas PAI berbeda orang dan tugasnya dan cukup banyak sekolah dan guru PAI yang menjadi sasaran pengawasan”. (Wawancara dengan Dr. H. Ahmadi H. Syukran Nafis, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, tanggal 10 Mei 2013).

c. Sarana dan Prasarana

Menurut para pengawas, penilaian terhadap sarana dan prasarana yang dipakai dalam melakukan kepengawasan selama ini relatif saja, ada yang menganggap sudah layak saja, namun ada yang menganggap kurang layak. Seperti sepeda motor dinas sudah seleyaknya diganti dengan yang baru untuk kenyamanan dan kelancaran dalam melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Sepeda motor dinas yang ada sudah relatif tua usianya dan sering rusak. Hingga sekarang belum ada pergantian kendaraan dinas tersebut. Berbeda dengan sepeda motor sebagai kendaraan dinas para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tampak lebih baru dan bagus dengan merek yang lebih berkualitas. Di antara pengawas PAI ada yang menekankan perlunya Kementerian Agama mempunyai mobil dinas sebagai mobil operasional untuk bisa dipakai secara bersama-sama.

Peralatan berupa buku-buku catatan maupun buku-buku pedoman kepengawasan yang selama ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas, pengawas jangan sampai kalah informasi dari guru, oleh karena itu seorang pengawas harus menguasai teknologi informasi juga memilikinya, misalnya kamera yang agak canggih dan komputer tablet. Selama ini sebagian pengawas sudah memilikinya dengan cara membeli sendiri.

Mereka mengharapkan jika keuangan pemerintah memungkinkan juga dibelikan untuk kelancara tugas. Para pengawas PAI dari Kementerian Agama melihat sarana dan fasilitas serta tingkat kesejahteraan pengawas sekolah umum yang diangkat oleh Departemen Pendidikan Nasional lebih bagus, disebabkan perhatian pemerintah daerah yang lebih tinggi.

d. Keterbatasan Kompetensi

Menghadapi tantangan tugas yang semakin berat, para pengawas merasakan bahwa kompetensi yang mereka miliki masih kurang dan perlu ditingkatkan. Karena itu sebagai masukan kepada sesama pengawas mereka menyarankan untuk meningkatkan kompetensi. Namun di antara pengawas ada yang motivasinya rendah, sebab mereka mengatakan dirinya sudah masuk kotak, sebentar lagi akan pensiun.

Kemudian dari pihak kepala sekolah dan guru PAI juga mengharapkan kepada pengawas untuk lebih banyak melakukan supervisi akademik dari pada supervisi manajerial. Kepada Pemerintah Kota untuk tidak membedakan antara pengawas sekolah dengan pengawas PAI dari Kementerian Agama dalam hal fasilitas dan kesejahteraan.

Para kepala sekolah juga menyarankan agar pengawas lebih meningkatkan konsentrasi kepengawasannya bagi guru-guru agar guru-guru dapat lebih meningkatkan potensi keguruannya.

”Mengingat tantangan tugas yang semakin berat, seyogyanyalah para pengawas meningkatkan kompetensinya, baik melalui pendidikan formal S2 maupun melalui pendidikan, pelatihan, penataran dan sejenisnya, juga dengan lebih aktif membaca buku-buku tentang kepengawasan dan pendidikan. Di samping itu ruang lingkup kepengawasan lebih disederhanaan lagi. Maksudnya

ada pengawas khusus menangani manajerial dan ada pengawas yang khusus menangani akademik”. (Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Gazali, M.Pd.I, Kepala SMAN 10 Banjarmasin tanggal 15 Mei 2013).

Sebaiknya jeda waktu kunjungan ke sekolah jangan terlalu lama, bimbingan dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan harapan guru agar pengawas benar-benar menjalankan kepengawasannya secara maksimal, yakni lebih sering datang ke sekolah dan melakukan observasi kelas. Tingkatkan pembinaan terhadap guru PAI di sekolah, jangan merasa asing datang ke sekolah umum, berikan informasi baru yang berhubungan dengan Kementerian Agama terkait dengan PAI kepada guru agama. Selalu ada pertemuan dengan Pengawas masing-masing atau pengawas pembina di MGMP PAI. Jadi harus ada koordinasi antara pengawas dan guru-guru agama. Minimal selalu ada pertemuan dua kali setahun antara pengawas dengan guru-guru PAI di MGMP/di Kantor Kementerian Agama.